

## Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Incumbent Study Pilkada Di Kabupaten Trenggalek

Roudhotul Uswatun Khasanah<sup>1</sup>, Cindy Khofifah Yulianti<sup>2</sup>, Mila Nur Kumala<sup>3</sup>, Laily Purnawati<sup>4</sup>

Universitas Tulungagung

[roudhutulswatunk@gmail.com](mailto:roudhutulswatunk@gmail.com)<sup>1</sup>, [CindyKhofifah96@gmail.com](mailto:CindyKhofifah96@gmail.com)<sup>2</sup>, [milanurkumala@gmail.com](mailto:milanurkumala@gmail.com)<sup>3</sup>,

[lailypurnawatisip@gmail.com](mailto:lailypurnawatisip@gmail.com)<sup>4</sup>

Diserahkan tanggal 07 Januari 2025 | Diterima tanggal 07 Januari 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Januari 2025

### **Abstract:**

*In the 2024 District Head Election in Trenggalek Regency, two contenders will face off against blank ballots. What makes this candidate unique for Trenggalek Regency is that they have both served as Regent and Deputy Regent. The purpose of this research is to learn how voters in the Trenggalek Regency felt about the current regional office holders. This study applies the principle of rational action as out by Max Weber. The results of the Trenggalek Regency Election are consistent with Max Weber's notion of rational choice. This research is descriptive in nature and employs a qualitative methodology. Research on public perception of incumbent candidates in the Trenggalek Regency regional elections found that, on average, Trenggalek residents favor candidates with well-defined platforms and strong support for local initiatives. Additionally, residents of Trenggalek believe that the current incumbent has done an excellent job leading the regency in all areas of development, and they believe that the current defense should be re-elected for another five years. This research concludes that the public views incumbent candidates differently depending on their reputation, experience, and abilities.*

**Keywords:** *Public perception, Incumbent candidate, Regional Elections, Trenggalek Regency*

### **Abstrak :**

*Pada Pemilihan Bupati 2024 di Kabupaten Trenggalek, dua kandidat akan berhadapan dengan surat suara kosong. Yang membuat kandidat ini unik untuk Kabupaten Trenggalek adalah bahwa mereka berdua pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perasaan pemilih di Kabupaten Trenggalek terhadap para pemegang jabatan kepala daerah saat ini. Penelitian ini menggunakan prinsip tindakan rasional yang dikemukakan oleh Max Weber. Hasil dari Pilkada Kabupaten Trenggalek sesuai dengan gagasan Max Weber tentang pilihan rasional. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian mengenai persepsi publik terhadap kandidat petahana dalam Pilkada Kabupaten Trenggalek menemukan bahwa, secara rata-rata, warga Trenggalek lebih menyukai kandidat dengan platform yang jelas dan dukungan yang kuat terhadap inisiatif lokal. Selain itu, warga Trenggalek percaya bahwa petahana saat ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memimpin kabupaten tersebut di semua bidang pembangunan, dan mereka percaya bahwa petahana saat ini harus dipilih kembali untuk lima tahun ke depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa publik memandang kandidat petahana secara berbeda tergantung pada reputasi, pengalaman, dan kemampuan mereka.*

**Kata Kunci:** *Persepsi masyarakat, Calon incumbent, Pilkada, Kabupaten Trenggalek*

---

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Pilkada adalah referendum yang diselenggarakan oleh penduduk di daerah administratif lokal untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Pada tahun 2005, putaran pertama pemilihan kepala daerah dilakukan setelah disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di bawah pengawasan BAWASLU, pemilihan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Kabupaten/Kota. Mereka yang ikut serta dalam Pilkada dapat berupa anggota partai politik tertentu, gabungan partai, atau bahkan hanya pasangan calon yang memiliki banyak dukungan. (Daerah, 2018). Pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan metode demokrasi untuk memilih pemimpin daerah, menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25). Setiap anggota masyarakat PILKADA memiliki hak suara yang sama dalam pemilihan umum. Sistem yang tidak memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih pemimpin mereka sendiri merusak seluruh definisi negara demokrasi. Sebagai tanda negara demokrasi, pemilihan umum terus berlangsung. Kemampuan untuk memilih pemimpin hanyalah salah satu ukuran demokrasi (Natalia, 2015).

Tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan direktur, letnan, dan auditor tahun 2024, serta bendahara, auditor, dan anggota dewan kota, dituangkan dalam PKPU No.2 Tahun 2024. Tanggal 27 November 2024 merupakan tanggal dimulainya proses pemilihan. Sebelas provinsi, lima belas kabupaten, dan sembilan puluh tiga kota akan memberikan suaranya dalam pemilihan berikutnya dari total 545 daerah. Keinginan pemerintah untuk mempertahankan demokrasi prosedural ini tidak menunjukkan adanya pertumbuhan demokrasi substantif, di mana orang memilih dari berbagai kandidat. Ruang bagi pilihan pemilih sangat minim ketika hanya ada satu kandidat di lapangan. Jika dipikir-pikir, kenyataannya adalah bahwa banyak daerah mencalonkan kembali mantan pemimpin daerah mereka sendiri, yang terkadang dikenal sebagai kandidat petahana. Pertama, masyarakat atau partai politik yang bersangkutan memiliki banyak kepercayaan kepada kandidat; kedua, prosedur rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka tidak diikuti. Kedua faktor tersebut merupakan faktor paling krusial yang menyebabkan pencalonan ini.

Dalam pembahasannya tentang rekrutmen politik, Surbakti mendefinisikannya sebagai proses pemilihan individu atau kelompok untuk bertugas di pemerintahan atau organisasi politik. (150). (2010, halaman). Metode pengisian jabatan politik di suatu negara agar sistem politik dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat serta keamanan bagi penduduk dijelaskan oleh sudut pandang lain tentang subjek tersebut sebagai rekrutmen politik. Tidak jelas apakah kata "rekrutmen politik" muncul dalam UUD 1945 atau konstitusi. Di sisi lain, pasal-pasal tersebut mengatur proses pemilihan dan pelantikan pejabat pemerintah. Pengangkatan pejabat baru merupakan perhatian utama dalam UU ketatanegaraan (Gumilar, 2022).

Menurut kata JAH Logemann. Negara pada dasarnya adalah hierarki peran, dan jabatan merupakan hal yang mendasar bagi segalanya. Jabatan menimbulkan banyak masalah, seperti yang berkaitan dengan perolehan, penerimaan, penempatan, pemindahan, penutupan, dan pemberhentian. Meskipun demikian, suksesi, pengangkatan, pemilihan, dan penggantian merupakan metode pengangkatan secara berurutan (Suhaimi, 2021).

Menurut esai Sigmund Neumann, *Modern Political Parties*, "Dalam politik, partai politik adalah sekelompok orang yang bersatu untuk membentuk organisasi dengan tujuan bersama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat umum dan akhirnya mengambil alih pemerintahan." Ini berarti bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terlibat aktif dalam politik dan yang tujuannya adalah untuk mengendalikan kekuasaan pemerintahan. Selama pemilihan daerah, partai politik memiliki tanggung jawab untuk mencalonkan kandidat. Sebagai badan utama yang memiliki kekuasaan untuk memilih calon presiden, pemilihan daerah Indonesia dan UU partai politik memastikan bahwa partai politik akan hadir (Hardani, 2016).

Tanggung jawab partai politik untuk merekrut warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mengingat Kabupaten Trenggalek akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, di mana dua calon akan memperebutkan satu kursi, maka menjadi tanggung jawab partai politik untuk mendorong calon-calon potensial untuk mencalonkan diri dan menjadi wakil partai, serta membina kader-kader partai yang paling berkualitas untuk menduduki jabatan publik dan politik melalui proses yang demokratis. Pada 27 November 2024, Pilkada Kabupaten Trenggalek telah diselenggarakan, dan banyak hal menggelitik dan tidak biasa terjadi. Petahana dicalonkan oleh semua partai di DPRD Kabupaten Trenggalek untuk pertama kalinya, yakni PDIP, PKB, PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, dan PAN karena elektabilitas mereka yang kuat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam tata cara pemilihan di Trenggalek, dan ini merupakan kejadian yang kedua. Sebuah babak baru dalam sejarah politik Trenggalek ditulis oleh kejadian luar biasa ini. Meskipun demikian, kejadian ini merupakan contoh bagaimana partai politik gagal melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya. Selain itu, Bupati Trenggalek saat ini, Mochamad Nur Arifin, dan wakilnya, Syah Muhammad Natanegara, kembali maju dalam Pilkada 2024. Pilkada 2020 merupakan ajang sebelumnya bagi kedua kandidat.

Persepsi publik mengacu pada bagaimana individu melihat sesuatu atau bagaimana mereka memahami hasil dari proses berpikir. Kelima indra, ingatan, dan kekuatan spiritual bereaksi terhadap rangsangan lingkungan, yang pada gilirannya memengaruhi opini publik. Persepsi adalah proses di mana seorang individu memperoleh informasi baru tentang lingkungan sekitar dan dunia di sekitarnya. Orang tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik jika mereka tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan sebagian besar berasal dari persepsi (Puspitasari, 2024).

Robin (2001:88) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka, hal ini terjadinya sebuah perbedaan dalam mempersepsikan suatu objek yang sama sangat dipengaruhi siapa yang berpersepsi dalam artian bahwa penafsiran dipengaruhi

pribadi peleku seperti sikap, minat, dan motif. (Pasinringi & Bahri, 2019). Akibatnya, warga Trenggalek pada umumnya memiliki pendapat tentang kandidat terkemuka di Kabupaten Trenggalek. Orang-orang yang sejalan dengan tuntutan mereka dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan adalah orang-orang yang mereka pilih untuk menjabat. Mantan pemimpin tersebut mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa di semua bidang, dan masyarakat Trenggalek percaya bahwa mereka layak untuk lima tahun lagi memimpin Kabupaten Trenggalek. Masyarakat Trenggalek telah memilih bupati dan wakil bupati saat ini untuk mencalonkan diri lagi karena mereka telah menyelesaikan banyak rencana.

Max Weber, seorang sosiolog Jerman, menciptakan gagasan tentang akal budi, yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Menurut Weber, rasionalitas adalah aktivitas sosial. Menurut Max Weber, kesadaran individu dan kelompok berperan dalam perilaku sosial yang dimotivasi oleh tujuan dan maksud. Dengan melihat alasan dan hasil yang diharapkan oleh seorang aktor melalui perilaku sosialnya, rasionalitas menyediakan lensa untuk mengamati dan memahami aktor, baik mereka individu maupun kelompok (septi novia hesti, 2020).

Di negara demokrasi, partai politik seharusnya diizinkan untuk menjalankan tugasnya, setidaknya secara teori. Dengan bergabung dengan partai politik, Budiardjo berpendapat, masyarakat umum dapat memiliki suara dalam urusan nasional dan meminta pertanggungjawaban wakil rakyat yang mereka pilih untuk memenuhi kebutuhan mereka (Syahid & Idris, 2021). Namun, di negara demokrasi, partai politik masih jauh dari yang seharusnya. Misalnya, di Indonesia, mayoritas partai politik sangat kurang dalam hampir setiap bidang, mulai dari filosofi hingga kemampuan berorganisasi. Setiap kali kebijakan atau pilihan partai utama diperebutkan, jelas bahwa sebagian besar partai politik terlalu sibuk dengan pertikaian satu sama lain, atau lebih buruk lagi, dengan pertikaian internal partai. Itu karena mereka tidak bertanggung jawab untuk mendidik konstituen, merekrut anggota baru, atau mengelola konflik di antara kepentingan konstituen. Informasi tersebut ditemukan di Meyer (2008) pada halaman 22.

Kaderisasi internal partai sering kali menggunakan pendekatan yang kaku dan kardinal, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa contoh. Sebagai gambaran betapa buruknya kinerja partai politik, perhatikanlah pemilihan umum daerah kabupaten Trenggalek tahun 2024. Proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik dalam pemilihan umum daerah Trenggalek tahun 2024 menjadi satu-satunya pokok bahasan penelitian ini. Karena hampir setiap partai politik mengusung duo kader nonpartai—Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara—tampaknya pemilihan umum ini gagal. Akan menarik untuk mengkaji pencalonan Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara oleh partai politik secara mendalam dari perspektif teoritis dan metodologis. Bagaimanapun, partai politik seharusnya mampu melatih anggotanya untuk peran-peran kunci dalam pemerintahan nasional dan daerah.

Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Trenggalek tahun 2024 mengungkap, meskipun secara tidak langsung, kekuatan berbagai fraksi politik di kabupaten tersebut. Dua kelompok politik tangguh, PDI Perjuangan dan Partai PKB, masing-masing memiliki 45 kursi di DPRD. Selain itu, di setiap daerah pemilihan, mereka berpotensi mengungguli empat belas partai politik lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggunakan persetujuan masyarakat terhadap petahana saat ini sebagai proksi pandangan masyarakat terhadap calon Pilkada saat ini, Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara, di Kabupaten Trenggalek. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pandangan komunikan (masyarakat) terhadap bupati petahana Pilkada, sehingga metode penelitiannya adalah kualitatif.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan gaya penulisan deskriptif, publikasi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif menggunakan deskripsi terperinci tentang fenomena yang diteliti, yang didukung oleh data dan informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian, untuk menarik kesimpulan tentang fenomena tersebut secara keseluruhan.(Costigliola, 2019). Untuk mengetahui bagaimana perasaan masyarakat Trenggalek terhadap kandidat pemilihan daerah saat ini, strategi penelitian ini akan digunakan. Peneliti dapat mengumpulkan informasi terperinci tentang pendapat, sikap, dan harapan masyarakat berkat metode ini.

Penelitian yang mengumpulkan informasi deskriptif tentang orang atau tindakan mereka melalui wawancara, kelompok fokus, atau pengamatan langsung dianggap kualitatif (Bogan dan Taylor Moleong, 2012:4). Teknik ini digunakan untuk alasan ini. Untuk lebih spesifik, informasi yang harus dikirim berbentuk perspektif pribadi, komentar, kritik, penjelasan, dan sejenisnya. Memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Karena pengumpulan informasi merupakan inti dari penelitian, maka metode pengumpulan data ini menjadi sangat penting. Kuesioner digunakan sebagai sarana pengumpulan data dalam penelitian ini. Tujuan dari pemberian kuesioner adalah untuk mengumpulkan informasi dari partisipan dengan meminta mereka mengisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis (Isti Pujihastuti, 2010).

## PEMBAHASAN

### Persepsi Masyarakat Trenggalek Terhadap Calon Petahana di Kabupaten Trenggalek

Tabel. Skor Skala Likert

No.	Menjawab	Skor
1.	Sangat setuju	375
2.	Setuju	120
3.	Cukup Setuju	95

4.	Diragukan	52
5.	Tidak setuju	21

Berdasarkan data pada tabel, sebagian besar responden di Kabupaten Trenggalek memiliki kesan positif terhadap program-program yang telah dijalankan oleh petahana sebelumnya, yang ditunjukkan dengan skor skala likert mereka. Selama menjabat, calon petahana tersebut tidak hanya membawa Kabupaten Trenggalek lebih maju dari sebelumnya, tetapi juga memperoleh berbagai penghargaan. Alhasil, Mochamad Nur Arifin dan Syah Mohamad Natanegara, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek saat ini, memperoleh dukungan bulat dari masyarakat Trenggalek. Kabupaten Trenggalek dibangun oleh petahana, dan masyarakat Trenggalek memilih generasi milenial untuk menjadi bupati dan wakil bupati karena prestasi yang telah dicapai. Warga Kabupaten Trenggalek menimbang-nimbang pilihan mereka sebelumnya dan akhirnya memilih bupati saat ini karena prestasi yang telah dicapainya.

### **Kepuasan Publik terhadap Kebijakan dan Program Calon Petahana**

Pemimpin atau manajer di tingkat daerah bertanggung jawab untuk menilai seberapa baik lembaga pemerintah masing-masing dalam menyelesaikan misinya. Jika pemerintah daerah tidak melakukan tugasnya, hal itu akan terlihat di tingkat federal sebagai implementasi nasional yang tidak efektif, yang pada gilirannya menurunkan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan daerah, Kepala Daerah dan perangkat daerah harus berkolaborasi. Menurut Osborne dan Gabler (1992, dalam Kaloh, 2003: 6), suatu daerah dapat dianggap berhasil jika tingkat kemiskinannya menurun, tingkat pendidikan masyarakatnya meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakatnya tetap stabil, dan tingkat kesehatannya tetap tinggi. Secara khusus, Kepala Daerah bertanggung jawab untuk memutuskan arah dan tujuan organisasi secara keseluruhan dan untuk memantau seberapa baik tujuan tersebut tercapai. Keberhasilan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator, pemimpin, pembina, dan pemberi layanan, antara lain, merupakan faktor utama dalam penentuan ini (Madjid, 2017).

Selama menjabat sebagai Bupati, Mochamad Nur Arifin dan wakilnya, Syah Mohamad Natanegara, berperan penting dalam memajukan Kabupaten Trenggalek melalui keberhasilan pelaksanaan beberapa inisiatif. Bupati Trenggalek saat ini telah berjanji untuk terus menjalankan inisiatif seperti survei kepuasan publik jika terpilih kembali. Publik akan memiliki kesempatan untuk mengevaluasi efisiensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kabupaten Trenggalek. Pemerintah yang dipimpinnya menggunakan ASN sebagai tumpuannya dengan skema ini. Kegagalan ASN untuk berfungsi secara efisien akan membuat semua inisiatif, visi, dan misi yang direncanakan menjadi tidak efektif. Petahana jelas berupaya membantu masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi, petahana telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan warga Kabupaten Trenggalek senang dengan itu.

## Partisipasi Publik dalam Proses Politik

Agar pemerintahan yang demokratis dapat berjalan, keterlibatan publik dalam politik sangatlah penting. Negara yang demokratis adalah negara yang mana rakyat memiliki hak untuk bersuara dalam pembuatan kebijakan dan penggunaan kewenangan mereka secara nyata. Terlibat dalam tindakan yang memengaruhi pengambilan keputusan politik berarti berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai individu maupun kelompok. Ada banyak cara untuk terlibat, seperti dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, atau mengambil bagian dalam diskusi atau protes publik (Arniti, 2020).

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan keterlibatan politik sebagai tindakan rakyat yang memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintahan mereka. Keterlibatan ini sangat penting bagi demokrasi dan penting bagi legitimasi dan transparansi operasi otoritas. (Samaragrahira, 2023). Partisipasi Publik dalam Proses Politik Trenggalek mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pemilihan umum hingga perencanaan pembangunan. Forum seperti Musrenbang dan festival gagasan menyediakan wadah bagi warga Trenggalek untuk berbagi harapan, impian, dan rencana mereka untuk masa depan. Warga Kabupaten Trenggalek telah menunjukkan dedikasi yang mendalam terhadap demokrasi lokal melalui keterlibatan aktif mereka dalam politik dan berbagai upaya yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan.

## SIMPULAN

Dengan tingkat elektabilitas lebih dari 60%, calon saat ini, Mochamad Nur Arifin dan Syah Mohamad Natanegara, memiliki dukungan kuat dari penduduk Kabupaten Trenggalek dalam pemilihan daerah berikutnya. Selain itu, pemilih sebagian besar mendukung petahana berdasarkan kinerja dan prestasinya, yang menunjukkan seberapa besar kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Meskipun kurangnya keberagaman dalam persaingan, masyarakat sangat sadar politik dan berdedikasi untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Popularitas dan rekam jejak pemimpin saat ini merupakan faktor penting yang dipertimbangkan pemilih saat membuat keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi pemilih telah berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Costigliola, F. C. (2019). Library of Congress Cataloging in Publication Data. *Awkward Dominion*, 381–382. <https://doi.org/10.7591/9781501721144-016>
- Daerah, P. P. (2018). *zainaluir88,+Achmad+Namlis+(4)+New. IV*, 40–47.
- Gumilar, A. T. (2022). Urgensi Rekrutmen Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Partai NasDem Kota Bandung. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 396–402. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1688>
- Hardani, S. (2016). Komitmen Partai Politik Terhadap Pencalonan perempuan Sebagai Anggota Legislatif Dalam Upaya Realisasi Undang-Undang No. 12 Th. 2003 Di Pekanbaru. *Marwah:*

- Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender, 13(2), 165.  
<https://doi.org/10.24014/marwah.v13i2.887>
- Isti Pujihastuti. (2010). Isti Pujihastuti Abstract. Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian, 2(1), 43–56.
- Madjid, L. (2017). Optimalisasi Pelayanan Publik Perspektif David Osborne. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(2), 130–140.
- Natalia, A. (2015). Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal TAPIs*, 11(1), 47–68.
- Pasinringi, A., & Bahri, S. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Platform Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019. *Kinesik*, 6(3), 263–277. <https://doi.org/10.22487/ejk.v6i3.87>
- Puspitasari, I. (2024). Persepsi dan Orientasi Politik Generasi Muda terhadap Pemilihan Partai Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 76–85. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2073>
- Samaragrahira, S. A. (2023). Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(3), 312–317.
- septi novia hesti, agus satmoko adi. (2020). Perilaku Pemilih dalam Pilkada Tahun 2019 di Desa Bakung Udanawu Blitar. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 749–763.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/36225>
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 27–51. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>
- Syahid, I., & Idris, A. (2021). Implementasi Rekrutmen Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Balikpapan Implementation of Recruitment for Members of the Prosperous Justice Party (PKS) in Balikpapan City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 147–155.